

PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN: MENGETAHUI LEGALITAS, KONSTRUKSI DAN KONSEKUENSI RUMUSAN DELIK

*(Sentence as the Attempt Of Covid-19 Pandemic Control Under The Health And Quarantine Acts:
Understanding Legality, Construction, And Consequence Of The Formation Of The Criminal Act)*

Joshua Aditya Setyanugraha

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

e-mail: adityajoshua13@gmail.com

Naskah diterima: 26 Februari 2021; revisi: 26 April 2021; disetujui: 28 April 2021

Abstrak

Upaya penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara sehingga diperlukan hukum pidana. Namun upaya pemidanaan terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB menimbulkan perdebatan dan pandangan yang diametral terkait penggunaan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan untuk menjeratnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami legalitas, konstruksi dan konsekuensi rumusan delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu yang hendak dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan dapat dilakukan sepanjang ditetapkan PSBB terhadap suatu wilayah oleh Menteri dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah PSBB jo. Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB. Selain itu, rumusan delik yang dirumuskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, alih-alih memberikan kepastian hukum, malah memberikan kerumitan bagi penegak hukum terkait konsekuensi yuridis yang timbul akibat perumusan deliknya. Pemidanaan dalam penanganan Covid-19 memang harus berdasarkan prinsip *ultimum remedium* namun penanggulangan di luar pemidanaan seperti membentuk kesadaran hukum masyarakat dirasa akan jauh lebih efektif.

Kata kunci: pemidanaan, rumusan delik, legalitas, Covid-19

Abstract

*The control of the pandemic Covid-19 is not only for personal purposes, but also for the public matters, which leads the government to apply the penal law. On the other hand, punishment towards the lawbreakers of Large-scale Social Restrictions inflicts disagreement and contradictory views of the use of Health and Quarantine Acts Article 93 used for arresting the lawbreakers. This study intends to understand the legality, construction and consequence of the formation of the criminal act in Health and Quarantine Acts Article 93. This research used normative study using a statutory approach and a conceptual approach to analyse the discussed issues. The result shows that sentence is legally applicable as far as the Large-scale Social Restrictions is applied in a certain region with the charge of the Minister under Health and Quarantine Acts jo. Government Ordinance of Large-scale Social Restriction jo. Health Ministerial Regulation of Large-scale Social Restriction. Moreover, the formation of the criminal act contained in Health and Quarantine Acts Article 93 provides confusion among the law enforcer related to judicial consequences as a result of the formation of the criminal act. Sentence in this pandemic indeed has been done by considering *ultimum remedium* principal. In contrast, it is rather effective in terms of establishing people's sense of justice than for sentencing.*

Keywords: conviction, formation of the criminal act, legality, covid-19